

Jurnal Manassa



Dick van der Meij

Sastra Sasak Selayang Pandang

Dwi Woro Retno Mastuti

‘Menjadi Jawa’: Naskah Cina-Jawa

Idham

Naskah Klasik di Kota Tidore Kepulauan
Provinsi Maluku Utara

Oman Fathurahman

Karakteristik Naskah Islam Indonesia:
Contoh dari Zawiyah Tanoh Abec, Aceh Besar

Etika Politik Kesultanan Melayu-Bima

M. Adib Misbachul Islam

Oman Fathurahman (ed.), “Jawharat al-Ma‘arif: Mempertegas Identitas Kesultanan Melayu”, dalam *Iman dan Diplomasi: Serpihan Sejarah Kesultanan Bima*, (Jakarta: KPG bekerja sama dengan Ecole francaise d’Extreme-Orient dan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2010), hlm. 191—214.

Kehadiran terbitan ilmiah terhadap naskah-naskah lama memang dapat memberikan informasi penting berkaitan dengan berbagai hal yang terjadi di masa lampau. Oleh karena itu, terbitnya edisi teks *Jawharat al-Ma‘arif* karya Haji Nur Hidayatullah al-Manshur Muhammad Syuja’uddin, salah satu keturunan bangsawan Bima, yang disunting oleh Oman Fathurahman, dan yang diterbitkan bersama dengan *Bo’ Bumi Luma Rasanae*, edisi Henri Chambert-Loir dan Massir Q. Abdullah, dan *Sepuluh Surat Sultan Bima Abdul Hamid Muhammad Syah*, edisi Suryadi, tidak ubahnya sebagai penemuan kembali serpihan sejarah sosial, intelektual, dan politik dari bangunan sejarah kesultanan Bima secara khusus dan kesultanan Melayu-Nusantara secara umum.

Dalam pengantar edisinya, penyunting melihat bahwa kehadiran teks *Jawharat al-Ma‘arif* merupakan dampak dari tradisi kesultanan Islam yang pernah mencapai masa keemasan di kawasan Melayu Nusantara sejak abad ke-17. Pada masa-masa keemasan itu beberapa karya mengenai kitab hukum politik (*Fiqh as-Siyāsah*) dan cerita mengenai raja-raja ditulis, baik oleh pengarang Melayu, seperti *Tāj as-Salāṭīn* karya Bukhari al-Jauhari, maupun oleh penulis luar yang merespons perkembangan politik yang berlangsung di kawasan Nusantara, seperti *al-Mawāhib ar-Rabbāniyyah* karya Muḥammad Ibnu ‘Allān Ibnu ‘Allān.

Dalam konteks ini, menurut penyunting, kehadiran teks *Jawharat al-Ma'arif* dan teks-teks lain yang sejenis merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap gagasan pengintegrasian Islam dengan sistem politik kerajaan atau kesultanan Melayu (hlm. 191).

Dalam perspektif historis, tradisi penulisan kitab mengenai etika politik dan kekuasaan di dunia Islam memang memiliki sejarah panjang. Setidak-tidaknya, tradisi tersebut dapat dirunut hingga pada masa Daulah Abbasiyyah yang berdiri pada abad ke-2 Hijriyyah di Baghdad. Berdirinya Daulah Abbasiyah yang dirintis oleh Abū al-'Abbās as-Saffāh dan dikukuhkan oleh Abū Ja'far al-Manṣūr itu memang telah mendorong para pemikir pada masa *khilāfah* 'Abbasiyyah untuk merumuskan panduan teoritis dan etis yang dapat dijadikan pegangan oleh para penguasa dan aparatnya. Hal itu dapat dilihat dari lahirnya sejumlah karya mengenai etika politik dan kekuasaan yang dikenal sebagai *al-Ādāb as-Sultānīyah*, seperti *al-Adab al-Kabīr*, *al-Adab al-Ṣagīr*, dan *Risālah aṣ-Ṣaḥābah* yang ditulis oleh 'Abdullāh Ibnu al-Muqaffa', *al-Tāj fī Akhlāq al-Mulūk* yang ditulis oleh Abū 'Uthmān al-Jāḥiẓ, dan *al-Aḥkām as-Sultānīyah* yang ditulis oleh al-Māwardī, (al-Jābirī, 1990).

Sebagai karya yang masuk dalam *genre al-Ādāb as-Sultānīyah*, isi teks *Jawharat al-Ma'arif* secara umum berpusat pada persoalan etika politik yang berkaitan dengan kewajiban dan kualifikasi seorang penguasa/sultan serta para pembantunya. Teks *Jawharat al-Ma'arif* terdiri atas lima fasal. Fasal pertama merupakan fasal yang secara khusus membahas persoalan etika politik, sedangkan fasal kedua hingga fasal kelima membahas ilmu hikmah sebagai bekal bagi seorang penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

Satu hal yang menarik, sebagai karya masa lampau, teks *Jawharat al-Ma'arif* mengandung pemikiran yang relevan dengan situasi sekarang. Ini dapat dilihat, antara lain, dari persoalan prosedur pengangkatan seorang menteri beserta kualifikasinya sebagai pembantu sultan. Dalam konteks ini, pengangkatan seorang menteri oleh sultan harus didasarkan atas pertimbangan kapabilitas dan integritas moral, dan karena itu terlebih dulu harus dilakukan uji kelayakan terhadap calon menteri itu (hlm.198).

Sebagai karya filologis, penerbitan teks *Jawharat al-Ma'arif* oleh Oman Fathurahman ini dilakukan secara kritis. Oleh karena itu, teks *Jawharat al-Ma'arif* disunting dengan melibatkan campur tangan penyunting melalui upaya perbaikan bacaan yang ditempatkan dalam

teks, sementara bacaan aslinya ditempatkan dalam aparat kritik. Selain itu, dalam terbitan ini juga dilengkapi dengan komentar yang juga ditempatkan dalam aparat kritik terhadap bagian-bagian yang dianggap penting untuk dijelaskan serta penelusuran terhadap sumber kutipan yang berasal dari Alqur'an. Satu hal yang perlu disayangkan, dalam terbitan ini penelusuran terhadap sumber periwayatan Hadits Nabi Muhammad saw. yang dikutip dalam teks tidak dilakukan secara memadai. Dari enam Hadits Nabi saw. yang dikutip dalam teks, hanya satu Hadits yang ditelusuri oleh penyunting. Meskipun demikian, langkah metodologis yang dilakukan oleh penyunting dalam menerbitkan teks *Jawharat al-Ma'arif* tersebut sangat membantu pembaca masa sekarang dalam mengatasi problem pembacaan dan pemahaman teks.

Tidak dapat dimungkiri, kehadiran teks *Jawharat al-Ma'arif* yang berasal dari kesultanan Bima ini dengan sendirinya memperlihatkan adanya prinsip-prinsip etis yang mendasari sistem politik dan pemerintahan kesultanan Melayu-Bima. Oleh karena itu, terbitan ilmiah teks *Jawharat al-Ma'arif* ini sangat bermanfaat sebagai sumber primer untuk penelitian tentang sejarah politik Islam di dunia Melayu-Nusantara.

M. Adib Misbachul Islam *Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*